

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran-On line 1

Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi



E-Learning
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2018

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami betapa pentingnya pembelajaran Pendidikan Pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi agar memperoleh pengetahuan (*knowledge*) nilai-nilai Pancasila, visi-misi serta tantangan pengamalannya yang dimanifestasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) nyata sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasilais.

Pada bagian pertama, pembahasan tentang Pengantar Pendidikan Pancasila, dilakukan dalam dua kali pembelajaran tatap muka dan/atau dua kali pembelajaran *on line*. Tatap muka pertama mulai dari pokok bahasan Pendahuluan sampai dengan Nilai-Nilai Pancasila. Pada pertemuan pembelajaran tatap muka kedua dan/atau pembelajaran *on line* kedua, pokok bahasan adalah Tantangan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila, sampai habis materi bagian pertama ini.

A. Pendahuluan

Pendidikan Pancasila merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia, terlebih warga negara yang masuk dalam kategori generasi millennial yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980-an hingga 2000 atau generasi muda yang saat ini berusia antara 15-35 tahun, dan seluruh warga negara Indonesia. Sebab terjadi pasang surut pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai akibat dari dicabutnya Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetya Pancakarsa. P-4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah Ketetapan MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), maka sejak itu pula kegiatan Penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan, termasuk pembelajaran pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi tidak ada lagi, ditiadakan dalam kurikulum dan digabung dengan pendidikan Kewarganegaraan..

Pancasila hampir dilupakan oleh bangsa Indonesia. Padahal Pancasila selain sebagai ideologi negara, juga sebagai dasar negara yang *notabene* sebagai dasar hukum dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar hukum negara, Pancasila tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meniadakan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dapat dianalogkan dengan tidak mengakui eksistensi Pancasila sebagai dasar hukum negara. Pancasila wajib dipahami dan diamalkan nilai-nilainya oleh seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali. Bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan hak-hak azasi yang wajib dijunjung tinggi serta diakui keberadaannya.

Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam butir-butir setiap sila Pancasila adalah sebagai pedoman hidup bangsa (*guiding principles*). Mana mungkin Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa akan dapat tersosialisasikan nilai-nilainya kepada seluruh warga negara Indonesia, bila tidak ada pembelajaran pendidikan Pancasila pada lembaga pendidikan. Nilai-nilai Pancasila inilah yang sebetulnya membentuk karakter bangsa Indonesia, sekaligus membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tantangan lain yang cukup kompleks adalah adanya gelombang revolusi 4.0 yaitu revolusi komunikasi dan informasi dengan internet sebagai basis transformasi. Berkembangnya teknologi informasi (TI) membuat setiap warga negara Indonesia, yang pada umumnya sudah melek teknologi informasi menjadi lebih mudah untuk menerima dan menyerap produk kemajuan ilmu pengetahuan di satu sisi, sebagai dampak positifnya. Namun pada sisi lain, informasi-informasi yang diterima belum dapat disortir secara intensif, sehingga banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya informasi-informasi tersebut, yang tentunya bertentangan dengan norma-norma Pancasila. Contoh-contoh informasi yang berdampak negatif antara lain, adanya berita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap anak, teroris, persekusi, pornografi, infiltrasi kebudayaan, dan lain sebagainya.

Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada setiap warga negara untuk dapat bersikap dan berbuat kebaikan, meningkatkan moralitas bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Menurut Ditjen Dikti (2016) Makna pembelajaran pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).



Gambar 1. Pancasila Ideologi Negara
 Sumber: *E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*

B. Dasar Hukum, Visi-Misi dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila

1. Dasar Hukum Pendidikan Pancasila

Kedudukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum (MKWU) yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, baik pada jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Sebagai mata kuliah wajib, maka pada tahun 2002 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat

Keputusan Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa agar ;

- 1). memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya;
- 2). memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
- 3). mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
- 4). mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- 1). Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2). Pasal 35 ayat (3) menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Dengan demikian, untuk melaksanakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, maka pendidikan Pancasila harus berdiri sendiri, tidak digabung dengan pendidikan Kewarganegaraan dan sebaliknya juga demikian. Ini berarti bahwa sejak diundangkannya dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, maka materi pendidikan Pancasila tidak digabung dengan pendidikan Kewarganegaraan, tetapi sebagai mata kuliah wajib yang berdiri sendiri dengan bobot 2 sks.

2. Visi – Misi Pendidikan Pancasila

Visi Pendidikan Pancasila

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Misi Pendidikan Pancasila

- 1). Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
- 2). Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
- 3). Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
- 4). Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (*synthetic discipline*), sebagai misi akademik (Sumber: Ristek Dikti. 2016).

3. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

- 1). menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2). sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
- 3). memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hari nurani;
- 4). mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
- 5). mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

Secara khusus tujuan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk :

- 1). memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2). memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3). mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

4. membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii).

D. NILAI-NILAI PANCASILA

Nilai-nilai Pancasila, sebagai penuntun (*guiding principles*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut memberikan pedoman dan norma untuk membangun karakter warga negara, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 ada 45 butir nilai-nilai Pancasila sebagai penuntun (*guiding principles*) kehidupan tersebut, yaitu :

Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir :

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan YME
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain.

Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa mebeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
8. Berani membela kebenaran dan keadilan
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir :

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
7. Menganjurkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
9. Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah

Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Menghormati hak orang lain
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
9. Suka bekerja keras
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

D. MAKNA DAN PENTINGNYA PENDIDIKAN PANCASILA

1. Makna Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi mahasiswa di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber, seperti: kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya, berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Mahasiswa perlu mengetahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajarkan kepada mereka.

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide *philosophische grondslag*. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya, seperti: Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo,

dan Sastrapratedja. Mereka termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat akan dibahas pada subbab tersendiri. Mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat.

Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Oleh karena itu, keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai (*value-free*).

2. Pengertian Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

3. Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang terpusat kepada mahasiswa (*student centered learning*), untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideology bangsa secara *scientific*. Dengan harapan, nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi *guiding principles* atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan/program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang.

Pembelajaran berpusat padamahasiswa membawa konsekwensi logis bahwa mahasiswa harus lebih aktif dalam menggali dan mendalami pengetahuan-pengetahuan Pendidikan Pancasila, baik secara teoritis maupun praktis yang tercermin dalam sikap dan perlakuan. Oleh sebab itu, pembelajaran lebih menekankan pada sistem pembelajaran andragogy. Suatu pembelajaran yang memberikan ruang gerak kepada mahasiswa agar lebih banyak men-*share* pengalaman-pengalaman belajar dan berinteraksi. Pengalaman-pengalaman pembelajaran tersebut diperoleh dari studi literasi dan studi lapangan dengan mengkaji secara cermat dan teliti pada setiap bahasan yang dipelajari.

4. Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga

daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 menegaskan bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Harapan tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan. Akan tetapi, pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melakukan rekayasa sosial secara damai. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah menggunakan atau mengalokasikan 20% dana APBN yang sebagian berasal dari pajak untuk membiayai pendidikan nasional.

Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Lebih-lebih, para mahasiswa yang *notabene* merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depan. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan/program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan/program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang.

Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun/membentuk peraturan perundangundangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut, harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan dan pola pengamalan yang lebih baik daripada warga negara yang lain karena merekalah yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun/dibentuknya.

Contoh lainnya, lulusan/output dari program studi energi di kemudian hari akan menentukan kebijakan tentang eksplorasi, eksploitasi, industrialisasi, dan distribusi energi dijalankan. Begitu pula dengan lulusan/output dari program studi perpajakan yang akan menjadi pegawai pajak maupun bekerja di bidang perpajakan, mahasiswa lulusan prodi

perpajakan dituntut memiliki kejujuran dan komitmen sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tempat bekerja secara baik dan benar.

Demikian pula halnya bahwa keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bahkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam hal ini, Riyanto (2009: 4) menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya.

Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting, tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha/ *entrepreneur*, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan.

TUGAS TERSTRUKTUR PERTAMA
Pertanyaan dijawab di halaman ini secara perorangan dan
dikumpulkan pada pertemuan berikut

1. Coba Anda jelaskan makna Pendidikan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Berikan juga contoh-cotohnya!
2. Anda diminta untuk membuat tulisan tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Setiap mahasiswa harus membuat masing-masing contoh dua sila dan dua butir nilai Pancasila. Jadi setiap satu sila satu butir, kemudian sila yang lainnya juga satu butir!

Lembar Jawaban:

1. _____

2. _____

3. _____

Nama mahasiswa : _____ NIM : _____
Dosen : _____ Seksi : _____